

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian, peneliti telah menetapkan beberapa kriteria untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan yang datanya dapat dijadikan penyelesaian dalam penelitian ini. Maka dari total 60 perusahaan yang terdaftar di Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi periode 2014-2017, maka terpilihlah 12 perusahaan yang memenuhi kriteria, berikut adalah sekilas tentang sejarah singkat masing-masing perusahaan terpilih:

1. PT. Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP)

CMNP berdiri pada 13 April 1987 sebagai konsorsium, yang terdiri dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang infrastruktur khususnya jalan tol. Berdirinya CMNP membuka era baru kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengusahaan jalan tol, melalui perannya membangun jalan tol ruas Cawang – Tanjung Priok (North South Link/ NSL) sepanjang 19,03 km. Keberhasilan pelaksanaan pilot proyek tersebut, membuat Pemerintah memberikan kepercayaan kepada CMNP untuk membangun jalan tol ruas Tanjung Priok – Jembatan Tiga/ Pluit (Harbour Road/ HBR) sepanjang 13,93 km Penyelesaian ruas jalan tol NSL dan HBR sepanjang 32,96 km atau yang dikenal dengan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc dengan

masa konsesi 31 tahun 3 bulan ini, telah memungkinkan sistem jaringan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, ruas Tomang – Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga – Pluit – Grogol – Tomang dapat beroperasi secara terpadu, di bawah pengelolaan bersama PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan CMNP dengan sistem bagi hasil Seiring dengan tuntutan ekspansi usaha, CMNP telah berubah statusnya menjadi perusahaan terbuka sejak 10 Januari 1995, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

2. PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR)

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978. Pada akhir dasawarsa tahun 80-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT).

3. PT. Nusantara Infrastructure Tbk (META)

Memainkan peran aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi di Indonesia. Infrastruktur ekonomi merupakan fasilitas internal sebuah negara yang membuat terjadinya kegiatan bisnis, seperti transportasi, komunikasi,

jaringan distribusi, lembaga keuangan dan pasar, dan sistem pasokan energi. Sebagai salah satu perusahaan infrastruktur swasta terkemuka di Indonesia, NI memiliki konsesi infrastruktur di bagian barat dan timur Indonesia yang memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi bisnis. Didirikan pada tahun 2006, NI memulai proyek pembangunan pertama di sektor Jalan Tol, dan memperluas portofolio ke banyak bidang sektor infrastruktur di Indonesia, meliputi Energi Terbarukan, Air Bersih, dan Pelabuhan Laut.

4. PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. Dalam upaya bertransformasi menjadi *digital telecommunication company*, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (*customer-oriented*). Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih *lean* (ramping) dan *agile* (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat.

5. PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)

perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan untuk korporasi, transportasi logistik, serta layanan pengemudi. Awalnya, ASSA Rent dirintis pada tahun 2003 dengan armada awal sejumlah 819 kendaraan di bawah nama Adira Rent. Pada bulan Oktober 2010, perusahaan resmi berganti nama menjadi ASSA Rent, dengan komitmen utama untuk senantiasa menyediakan kualitas layanan terbaik dan menjadi “Trusted Partner in Transportation Services”. Seiring perkembangan usaha yang pesat, kini ASSA Rent mengelola lebih dari 21,300++ kendaraan lebih dari

21,300++ **dan** 4,100++ pengemudi melayani lebih dari 1,000 perusahaan di Indonesia. ASSA Rent juga telah memperluas wilayah layanan ke hampir semua kota besar utama dan memberikan jaminan kelancaran operasional melalui 44 jaringan di seluruh Indonesia, lebih dari 864 bengkel perbaikan resmi, dengan didukung layanan 24 jam dari Solution Center 1500-369

6. PT. Blue Bird Tbk. (BIRD)

Dari taksi, kontainer dan alat berat, hingga logistik, Blue Bird Group adalah kelompok usaha yang siap melayani segala kebutuhan Anda. Bagi banyak warga Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, Blue Bird Group bukan hanya sekadar perusahaan taksi tapi menjadi bagian dari gaya hidup. Jika New York terkenal dengan yellow taxi dan London dengan black cab, maka Jakarta dengan Blue Bird: armada taksi biru yang selalu menghiasi jalan-jalan Ibukota yang sibuk setiap waktu. Dengan terus melayani jutaan penumpang setiap bulannya, Blue Bird Group telah memperluas jenis layanannya, mulai dari regular taxis (Blue Bird & Pusaka) sampai dengan executive taxi (Silver Bird), limousine & car rental (Golden Bird), charter bus (Big Bird), Logistic (Iron Bird Logistic), Industry (Restu Ibu Pusaka-Bus Body Manufacturing & Pusaka Niaga Indonesia), Property (Holiday Resort Lombok & Pusaka Bumi Mutiara), IT & Supporting Services (Hermis Consulting-IT SAP, Pusaka Integrasi Mandiri-EDC, Pusaka GPS, Pusaka Buana Utama-Petrol Station, Pusaka Bersatu-Lubricant, Pusaka Suku cadang Indonesia-Spare Part) dan Heavy Equipment (Pusaka Andalan Perkasa & Pusaka Bumi Transportasi). Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan dalam setiap bisnis yang kami jalani.

7. PT. Cardig Aero Service Tbk. (CASS)

Perkembangan CAS Group dimulai dengan berdirinya PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS Airport Services) pada tahun 1984, guna memenuhi kebutuhan jasa pendukung transportasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang juga mulai beroperasi pada tahun yang sama. Saat itu, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS Airport Services) melayani jasa *ground handling* dan *cargo handling* di

Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pada tahun 2004, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS Airport Services) mencatatkan saham di Bursa Efek Surabaya dan memulai kemitraan strategis dengan SATS (Singapore Airport Terminal Services) Ltd. pada tahun yang sama. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan bisnis jasa transportasi udara yang semakin meningkat, PT Cardig Aero Services, Tbk. (CAS Group) didirikan di tahun 2009. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2011, PT Cardig Aero Services, Tbk. (CAS Group) mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia.

8. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)

adalah perseroan yang bergerak dalam bidang jasa dan konsultasi pelayaran. Untuk menyediakan jasa pelayaran yang terintegrasi, perseroan mempunyai anak perseroan yaitu PT. Permata Barito Shipyard & Engineering yang bergerak dalam jasa perakitan dan perbaikan kapal. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk sebagai salah satu jasa pelayaran tertua di Indonesia, didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977 dan berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1989 perseroan memperluas bidang usahanya dengan menyediakan jasa angkutan laut, menjadi agen perantara dan pencari muatan, penyewaan kapal, dan jasa penunjang angkutan laut lainnya. Perseroan juga melengkapi kegiatan usahanya dengan menyediakan jasa perakitan dan perbaikan kapal melalui anak perseroannya PT Permata Barito Shipyard & Engineering, yang penyertaan sahamnya dilakukan sejak tahun 1998.

9. PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI)

Berdiri pada tanggal 6 Juli 2006, PT Bali Towerindo Sentra (“**Balitower**”) merupakan perusahaan penyedia infrastruktur Menara Telekomunikasi terkemuka di Propinsi Bali dan pelopor penyedia sarana Menara yang dilengkapi fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optic/nirkable yang senantiasa dapat mendukung kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi. Pada Tanggal 13 Maret 2014, Balitower resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan mulai diperdagangkan dengan kode Emiten BALI. Dalam menjalankan kegiatan

usahanya, Balitower memiliki 2 segmen usaha yaitu: 1. Penyewaan infrastruktur menara telekomunikasi (makro dan mikro) 2. Penyewaan infrastruktur jaringan fiber optic dan/atau transmisi. Balitower secara konsisten terus meningkatkan kinerja bisnis dalam kegiatan usahanya seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia, hal ini tercermin dengan terjalannya kerjasama yang baik dengan beberapa operator terkemuka di Indonesia dan perusahaan penunjang bisnis Balitower.

10. PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK)

BUKK atau selanjutnya disebut 'Bukaka' atau 'Perseroan', didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978 berdasarkan Akta Notaris Haji Bebasa Daeng Lalo, SH, No. 149 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/242/7 tanggal 21 Mei 1979. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir di tahun 2011 adalah sehubungan dengan penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh serta nilai nominal saham. Modal Dasar yang sebelumnya Rp2,000,000,000,000 diturunkan menjadi Rp1,352,000,000,000, terbagi atas 4,000,000,000 saham. Modal ditempatkan dan disetor diturunkan dari sebelumnya sebesar Rp1,320,226,000.000 menjadi Rp. 892,472,776,000.

11. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)

Merupakan perusahaan induk dari Tower Bersama Group. TBIG didirikan pada tahun 2004 dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 2010. Tower Bersama Group merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IBS

milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan.

12. PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR)

Didirikan pada Juni 2008 dengan fokus utama berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam memiliki dan mengoperasikan menara-menara telekomunikasi untuk operator-operator telekomunikasi nirkabel. Kegiatan-kegiatan SMN dijalankan melalui anak perusahaannya, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"). Protelindo didirikan pada tahun 2003 dan telah menjadi pemilik dan operator menara independen yang terbesar untuk operator-operator nirkabel di Indonesia. Kegiatan usaha utama dari Protelindo adalah menyewakan ruang pada menaranya yang dapat digunakan bersama untuk seluruh operator nirkabel besar di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Protelindo memiliki dan mengoperasikan lebih dari 17.400 menara di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 2010, SMN menyelesaikan penawaran umum perdana atas sahamnya dan sekarang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham "TOWR".

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen *Tax Aggressiveness* (Y) enam variabel independen (X), Koneksi Politik (X₁), Kepemilikan Manajerial (X₂), Kepemilikan Institusional (X₃), Komisaris Independen (X₄), Komite Audit (X₅), Kualitas Audit (X₆) dan satu variabel *control* (SIZE), berikut adalah pengolahan data masing-masing variabel:

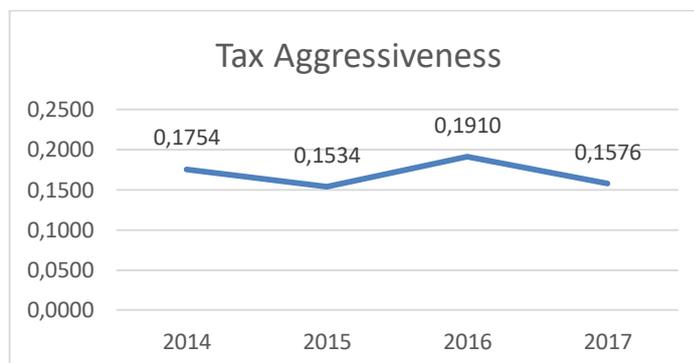
4.1.2.2 Variabel Dependen (Y)

a. *Tax Aggressiveness*

Pengukuran *tax aggressiveness* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan perbandingan antara kas yang dibayarkan untuk pajak kini perusahaan pada periode t dengan laba sebelum pajak tahun t. Nilai CETR yang semakin kecil menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang semakin besar dan sebaliknya, nilai CETR berkisar lebih dari nol (0) dan kurang dari satu (1)

$$CETR = \frac{\text{Kas Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Grafik 4.1 Rata-Rata Tax Aggressiveness



Berdasarkan grafik 4.1 di atas terjadi perubahan tidak merata pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak, yaitu di tahun 2014 terdapat perubahan CETR positif sebesar 0,1754 yang menunjukkan perusahaan telah melakukan upaya agresif laporan keuangan dalam tindakan penghindaran pajak. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 0,1534, tahun 2016 sebesar 0,1910, dan tahun 2017 sebesar 0 yang menunjukkan semakin kecil nilai CETR, maka dapat dikatakan perusahaan semakin agresif terhadap penghindaran pajak.

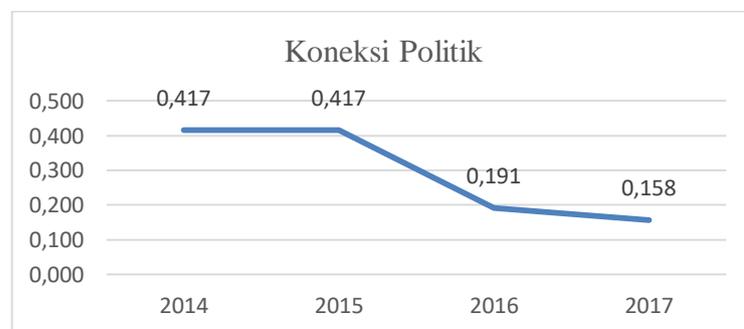
4.1.2.3 Variabel Independen (X)

a. Koneksi Politik (X₁)

pengukuran koneksi politik dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan yang memiliki koneksi diberi nilai satu (1), dan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik diberikan nilai nol (0). Berikut kriteria yang digunakan:

1. Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik
3. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya.

Grafik 4.2 Rata-Rata Koneksi Politik



Berdasarkan grafik 4.2 diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tidak menentu pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya koneksi politik, yaitu di tahun 2014 terdapat perubahan rata-rata koneksi politik sebesar 0,417 yang menunjukkan perusahaan telah melakukan upaya koneksi politik untuk kepentingan perusahaan terkait dengan penghindaran pajak. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 0,417, tahun 2016 sebesar 0,191 dan tahun 2017 sebesar 0,158 yang menunjukkan semakin besar persentase

koneksi politik suatu perusahaan, maka semakin banyak akses yang digunakan perusahaan dalam hal ini terkait dengan penghindaran pajak.

b. Kepemilikan Manajerial (X₂)

Pengukuran kepemilikan manajerial didalam penelitian ini diukur dengan membandingkan saham yang dimiliki manajerial dengan jumlah saham yang beredar

$$KM = \frac{\text{Total Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Grafik 4.3 Rata-Rata Kepemilikan Manajerial



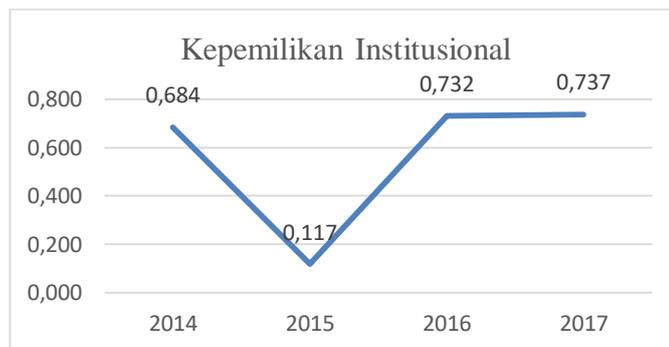
Berdasarkan grafik 4.3 diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tidak menentu pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya kepemilikan manajerial, yaitu di tahun 2014 terdapat perubahan rata –rata kepemilikan manajerial sebesar 0,090. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 0,1174, tahun 2016 sebesar 0,117, dan tahun 2017 sebesar 0,114 yang menunjukkan semakin besar persentase kepemilikan manajerial suatu perusahaan, maka manajerial akan semakin aktif dalam membentuk citra perusahaan dengan memberikan deviden yang besar kepada pemegang saham dan meminimalkan beban pajak.

c. Kepemilikan Institusional (X₃)

Pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{total jumlah saham yang beredar}}$$

Grafik 4.4 Rata-Rata Kepemilikan Institusional



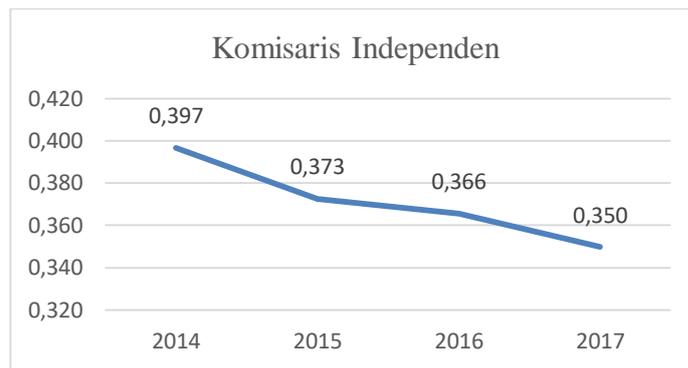
Berdasarkan grafik 4.4 diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tidak menentu pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya kepemilikan institusional, yaitu di tahun 2014 terdapat perubahan rata –rata kepemilikan institusional sebesar 0,684. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 0,117, tahun 2016 sebesar 0,732, dan tahun 2017 sebesar 0,737 yang menunjukkan semakin besar persentase kepemilikan institusional suatu perusahaan, maka akan semakin banyak tekanan yang dilakukan, hal ini terkait dengan laba yang diberikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan meminimalkan beban pajaknya.

d. Komisaris Independen (X₄)

Pengukuran komisaris independen didalam penelitian ini menggunakan proksi perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Grafik 4.5 Rata-Rata Komisaris Independen

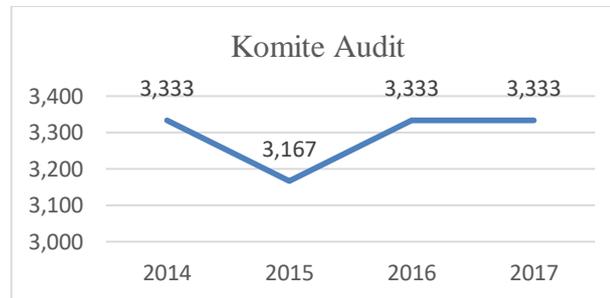


Berdasarkan grafik 4.5 diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tidak menentu pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya komisaris independen, yaitu di tahun 2014 terdapat perubahan rata –rata komisaris independen sebesar 0,397. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 0,373, tahun 2016 sebesar 0,366, dan tahun 2017 sebesar 0,350 yang menunjukkan semakin besar persentase komisaris independen suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula perumusan strategi dan perumusan pajak perusahaan, hal ini bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk.

e. Komite Audit (X₅)

pengukuran komite audit dalam penelitian ini menggunakan proksi banyaknya jumlah komite audit.

Grafik 4.6 Rata-Rata Komite Audit



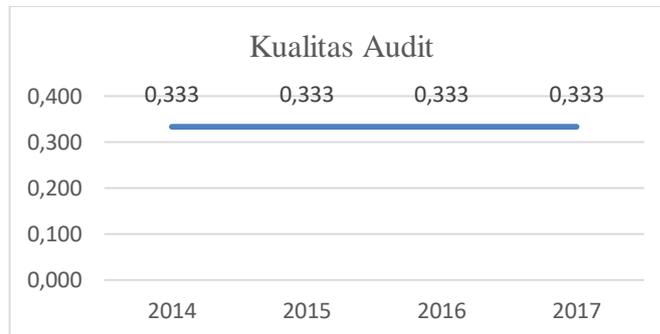
Berdasarkan grafik 4.6 diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan tidak menentu pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya komite audit, yaitu di tahun 2014 terdapat perubahan rata – rata komite audit sebesar 3,333. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 3,167, tahun 2016 sebesar 3,333, dan tahun 2017 sebesar 3,333 yang menunjukkan semakin besar persentase komite audit suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula perumusan strategi dan perumusan pajak perusahaan, hal ini dikarenakan komite audit lebih memahami celah dalam melakukan penghindaran pajak.

f. **Kualitas Audit (X₆)**

Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan yang menggunakan KAP dengan kriteria tertentu diberikan nilai satu (1), dan yang tidak memenuhi maka akan diberikan nilai (0). Kriteria KAP yaitu:

1. KAP Price Waterhouse Coopers
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)
3. KAP Ernest and Young
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu

Grafik 4.7 Rata-rata Kualitas Audit



Berdasarkan grafik 4.7 diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi perubahan pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di BEI yang menunjukkan adanya kualitas audit, yaitu di tahun 2014-2017 rata-rata kualitas audit sebesar 0,333. Semakin kecil persentase maka kualitas audit belum dapat dikatakan baik, yang artinya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan KAP dengan reputasi tinggi sehingga kemungkinan dalam penghindaran pajak akan semakin besar.

4.2 Hasil Uji Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistic Deskriptif

Analisis deskriptif ini hanya dilakukan untuk menyajikan dan menganalisis data yang didukung dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang diujikan (Nurgiyantoro, 2014)

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Stad. Deviasi
<i>Tax Aggressiveness</i>	0,005	0,393	0,169	0,103
Koneksi Politik	0,000	1,000	0,416	0,498
Kepemilikan Manajerial	0,000	0,477	0,110	0,176
Kepemilikan Institusional	0,371	0,989	0,722	0,212

Komisaris Independen	0,000	0,666	0,371	0,147
Komite Audit	3,000	7,000	3,291	0,944
Kualitas Audit	0,000	1,000	0,333	0,476
Ukuran Perusahaan	11,862	30,004	22,596	5,887

Sumber: Output yang diolah menggunakan Eviews 8 (2019)

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. *Tax Aggressiveness* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,005745 dan nilai maksimumnya sebesar 0,393 Nilai rata-rata CETR (*tax aggressiveness*) adalah sebesar 0.169. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,103 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel *Tax Aggressiveness* adalah sebesar 0,103 dari 48 sampel yang digunakan. Semakin kecil nilai nilai CETR maka dapat dikatakan perusahaan semakin tinggi dalam penghindaran pajak (agresif) begitu juga sebaliknya, jika nilai CETR semakin besar maka semakin rendah dalam melakukan penghindaran pajak. Nilai CETR berkisar antara lebih dari nol (0) dan kurang dari satu (1) Hanlon dan Heitzman (2010) dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil perhitungan nilai rata-rata *Tax Aggressiveness* yang diukur menggunakan CETR dapat dikatakan rata-rata perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi melakukan penghindaran pajak hal ini dikarenakan nilai rata-rata mendekati angka 0 yang artinya semakin kecil nilai CETR maka dapat dikatakan perusahaan semakin agresive terhadap pajak.

2. Koneksi Politik (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 0.000 dan nilai maksimumnya sebesar 1,000. Nilai rata-rata koneksi politik adalah sebesar 0.416 Sedangkan standar deviasi sebesar 0,498 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel koneksi politik adalah sebesar 0,498 dari 12 sampel yang digunakan. Semakin besar jumlah koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, karena itu artinya semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Infrastruktur, Utilitas

dan Transportasi melakukan koneksi politik hal ini dikarenakan nilai rata-rata mendekati nilai maksimum dibandingkan nilai minimumnya.

3. Kepemilikan Manajerial (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimumnya sebesar 0,477. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,110 Sedangkan standar deviasi sebesar 0,176 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 0.176 dari 12 sampel yang digunakan. Semakin besar nilai kepemilikan manajerial maka akan semakin agresif manajer dalam melakukan manajemen pajak. Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa manajer di perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi memiliki saham perusahaan.

4. Kepemilikan Institusional (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 0,371 dan nilai maksimumnya sebesar 0,989. Nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 0,722 Sedangkan standar deviasi sebesar 0,212 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,212 dari 12 sampel yang digunakan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diatas dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan sebagian besar dimiliki oleh institusi baik pemerintah dan perusahaan hal ini dikarenakan nilai rata-rata kepemilikan institusional lebih mendekati nilai maksimum dibandingkan nilai minimumnya.

5. Dewan Komisaris Independen (X_4) memiliki nilai minimum sebesar 0.000 dan nilai maksimumnya sebesar 0.666. Nilai rata-rata dewan komisaris independen adalah sebesar 0,371 Sedangkan standar deviasi sebesar 0,147 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel dewan komisaris independen adalah sebesar 0,147 dari 12 sampel yang digunakan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi memiliki anggota dewan komisaris lebih dari satu.

6. Komite Audit (X_5) memiliki nilai minimum sebesar 3,000 dan nilai maksimumnya sebesar 7,000 Nilai rata-rata komite audit adalah sebesar 3,291 Sedangkan standar deviasi sebesar 0,944 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel komite audit adalah sebesar 0,944 dari 12 sampel yang

digunakan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah komite audit dengan jumlah lebih dari minimum hal ini akan berdampak pada kinerja karena akan banyak persepsi dalam pengambilan keputusan.

7. Kualitas Audit (X_6) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimumnya sebesar 1,000 Nilai rata-rata kualitas audit adalah sebesar 0,333. sedangkan standar deviasi sebesar 0,476. memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kualitas audit adalah sebesar 0,476 dari 12 sampel yang digunakan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan telah menggunakan jasa KAP yang telah diakui kualitasnya, sehingga kecil kemungkinan perusahaan dalam melakukan *tax aggressiveness*.

8. Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 11,862 dan nilai maksimumnya sebesar 30,004 Nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 22.59629. sedangkan standar deviasi sebesar 5,887. memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kualitas audit adalah sebesar 5,887 dari 48 sampel yang digunakan. Dari hasil perhitungan rata-rata diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan di sekto Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi memiliki asset yang besar sehingga menghasilkan laba yang besar juga, hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait dengan *tax aggressiveness*.

4.3 Pemilihan Model Analisis

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Menurut Widarjono (2007), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. 1). uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Commom Effect* atau metode *Fixed Effect*. 2). uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. 3). uji *Lagrange*

Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.

4.3.1 Uji chow

Tabel. 4.2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,771	(11,29)	0,0137
Cross-section Chi-square	34,485	11	0,0003

Sumber: data diolah eviews 8 (2019)

H_0 = Metode OLS (CEM)

H_1 = Metode FEM

Jika uji F test tihat all $u_i = 0$ bernilai signifikan atau dengan kata lain $F\text{-test} < \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima yang berarti ada perbedaan *cross section* dan model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan *model common effect*.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa nilai uji F test adalah sebesar $0,0137 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Yang berarti model *fixed effect (FEM)* lebih tepat dibandingkan dengan *model common effect (CEM)*.

4.3.2 Uji Hausman

Tabel.4.3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27,859	7	0,0002

Sumber: data diolah eviews 8 (2019)

H_0 = Metode REM

H_1 = Metode FEM

Jika nilai Prob. Uji hausman Lebih kecil dari nilai α (0,05) maka H_0 ditolak, H_1 diterima, yang berarti *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model (REM)*.

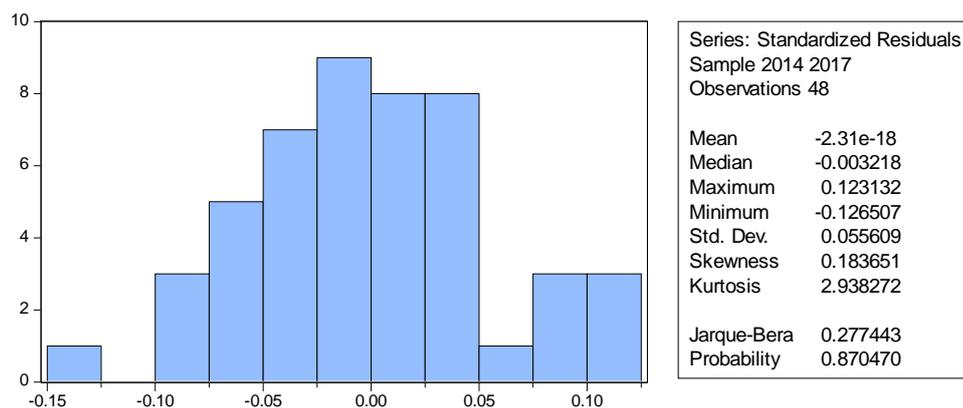
Dari table 4.6 dapat diketahui bahwa nilai prob. Uji hausman adalah sebesar $0,0002 < 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model (REM)*.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk melihat kenormalan distribusi dalam model regresi pada variabel pengganggu atau variabel residual. Uji normalitas penting untuk dilakukan karena jika asumsi klasik dihilangkan, maka uji statistik menjadi tidak valid. Dalam penelitian ini Uji normalitas dapat dilihat melalui penyebaran data yang ada pada sumbu diagonal dari grafik

Grafik 4.8 Normalitas



Sumber: data diolah eviews 8 (2019)

Apabila nilai Prob JB hitung lebih besar dari 0,05 maka residual terdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai Prob. JB lebih kecil dari 0,05 maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Prob JB sebesar $0,870470 > 0,05$, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen didalam model regresi yang dilakukan. Uji ini dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Cara yang digunakan oleh peneliti untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas pada model data panel adalah dengan koefisien korelasi, jika nilai koefisien korelasi masing-masing variabel lebih kecil dari 0,8 maka dapat dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya jika koefisien korelasi masing-masing variabel lebih besar dari 0,8 maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Koneksi Politik	1,000	0,087	0,496	-0,313	0,324	0,478
Kepemilikan Manajerial	0,087	1,000	-0,422	-0,283	-0,190	-0,236
Kepemilikan Institusional	0,496	-0,422	1,000	-0,192	0,319	0,208
Komisaris Independen	-0,313	-0,283	-0,192	1,000	0,232	-0,176
Komite Audit	0,324	-0,190	0,319	0,232	1,000	0,394
Kualitas Audit	0,478	-0,236	0,208	-0,176	0,394	1,000

Variabel dependen (y) Tax Aggressiveness

Sumber: Output yang diolah menggunakan Eviews 8 (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi masing-masing variabel lebih kecil dari 0.8, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan residual satu ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	0,095	0,067	1,407	0,170
Koneksi Politik	-0,008	0,024	-0,331	0,742
Kepemilikan Manajerial	0,025	0,071	0,347	0,730
Kepemilikan Institusional	-0,008	0,047	-0,170	0,865
Komisaris Independen	-0,049	0,049	-1,002	0,324
Komite Audit	-0,007	0,008	-0,870	0,391
Kualitas Audit	0,004	0,017	0,267	0,790
Size	-0,0001	0,001	-0,129	0,897

Variabel dependen (y) tax aggressiveness

Sumber: Output yang diolah menggunakan Eviews 8 (2019)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai dari prob masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala hesterokadasitas.

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1 Analisis Data Panel

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh koneksi politik, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness*. Data panel adalah kombinasi antara data silang tempat (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) (Kuncoro,2011).

Tabel 4.5
Data Panel Sebelum Variabel Control

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,123	0,118	1,038	0,307
Koneksi Politik	0,151	0,063	2,398	0,022
Kepemilikan Manajerial	0,032	0,191	0,170	0,865
Kepemilikan Institusional	0,030	0,128	0,236	0,814
Komisaris Independen	0,153	0,130	1,177	0,248
Komite Audit	-0,024	0,020	-1,196	0,240
Kualitas Audit	-0,061	0,047	-1,304	0,201
R-squared	0,471			
Adjusted R-squared	0,171			
F-statistic	1,571			
Prob(F-statistic)	0,135			

Variabel dependen (*Y*) *tax aggressiveness*
(Sumber: Data Sekunder 2019)

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linear berganda sebelum menggunakan variabel *control* dengan menggunakan program *Eviews* versi 8 for windows didapat hasil sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha 0,123 + \beta_1 0,151 X_{1it} + \beta_2 0,032 X_{2it} + \beta_3 0,030 X_{3it} + \beta_4 0,153 X_{4it} - \beta_5 0,024 X_{5it} - \beta_6 0,061 X_{6it} + e_{it}$$

1. Pada persamaan regresi di atas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,123, menunjukkan jika variabel independen dianggap tidak ada maka akan terjadi kenaikan CETR sebesar 0,123.
2. Koefisien regresi untuk variabel koneksi politik sebesar 0,151 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat koneksi politik maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,151.
3. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,032 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kepemilikan manajerial maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,032.
4. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,030 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kepemilikan institusional maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,030.
5. Koefisien regresi untuk variabel komisaris independen sebesar 0,153 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat komisaris independen maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,153.
6. Koefisien regresi untuk variabel komite audit sebesar -0,024 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat komite audit maka dapat menurunkan variabel CETR sebesar 0,024.
7. Koefisien regresi untuk variabel kualitas audit sebesar -0,061 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kualitas audit maka dapat menurunkan variabel CETR sebesar 0,061

4.5.2 Analisis Data Panel Variabel *Control*

Tabel 4.6
Uji Variabel *Control* Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	0,637	0,136	4,664	0,0001
Koneksi Politik	0,089	0,048	1,822	0,0787
Kepemilikan Manajerial	-0,072	0,144	-0,499	0,6211
Kepemilikan Institusional	0,073	0,096	0,762	0,4518
Komisaris Independen	0,065	0,099	0,659	0,5150
Komite Audit	-0,072	0,017	-4,034	0,0004
Kualitas Audit	-0,067	0,035	-1,907	0,0664
SIZE	-0,013	0,002	-4,957	0,0000
Cross-Section Fixed (Dummy Variables)				
R-Squared	0,713			
Adjusted R-Squared	0,535			
F-Statistic	4,015			
Prob(F-Statistic)	0,0004			

Variabel dependen (y) *Tax Aggressiveness*
(Sumber: Data Sekunder 2019)

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linear berganda sesudah menggunakan variabel *control* dengan menggunakan program *Eviews* versi 8 for windows didapat hasil sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha 0,637 + \beta_1 0,089 X_{1it} - \beta_2 0,072 X_{2it} + \beta_3 0,073 X_{3it} + \beta_4 0,654 X_{4it} - \beta_5 0,072 X_{5it} - \beta_6 0,067 X_{6it} - \beta_7 0,013 SIZE + e_{it}$$

1. Pada persamaan regresi di atas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,637, menunjukkan jika variabel independen dianggap tidak ada maka akan terjadi kenaikan CETR sebesar 0,637.
2. Koefisien regresi untuk variabel koneksi politik sebesar 0,089 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat koneksi politik maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,089.

3. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar -0,072 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kepemilikan manajerial maka dapat menurunkan variabel CETR sebesar 0,072.
4. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,073 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kepemilikan institusional maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,073.
5. Koefisien regresi untuk variabel komisaris independen sebesar 0,654 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat komisaris independen maka dapat menaikkan variabel CETR sebesar 0,654.
6. Koefisien regresi untuk variabel komite audit sebesar -0,072 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat komite audit maka dapat menurunkan variabel CETR sebesar 0,072.
7. Koefisien regresi untuk variabel kualitas audit sebesar -0,676 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kualitas audit maka dapat menurunkan variabel CETR sebesar 0,676
8. Koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan sebesar -0,013 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kualitas audit maka dapat menurunkan variabel CETR sebesar 0,013

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Koefisien Determinasi Sebelum Menggunakan Variabel *Control* (Adjusted R²)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (Adjusted R²) = 0,171, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 17, 1% sisanya sebesar 82,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.6.2 Koefisien Determinasi Sesudah Menggunakan Variabel Control (Adjusted R²)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (Adjusted R²) = 0,535, artinya variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 53,5% sisanya sebesar 46,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.6.3 Uji Parsial (t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen yaitu Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit, dan ukuran perusahaan sebagai variabel control terhadap variabel dependen yaitu *Tax Aggressiveness*.

1. H₀: Jika , sig < α (0,05) maka H₀ diterima atau menolak H₁ (variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
2. H₁: Jika sig > α (0,05) maka H₀ ditolak atau menerima H₁ (variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

\

4.6.3.1 Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas koneksi politik sebelum menggunakan variabel *control* sebesar 0,022 (0,022 < 0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan H₀ diterima, dan H₁ ditolak yang berarti bahwa Koneksi Politik sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.2 Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas kepemilikan manajerial sebelum menggunakan variabel *control* sebesar 0,865 ($0,865 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, dan H_1 diterima yang berarti bahwa Kepemilikan Manajerial sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.3.3.3 Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas kepemilikan institusional sebelum menggunakan variabel *control* sebesar 0,8147 ($0,8147 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 ditolak yang berarti bahwa Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.4 Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas komisaris independen sebelum menggunakan variabel *control* sebesar 0,2481 ($0,2481 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa dewan komisaris independen sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.5 Hipotesis 5

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas komite audit sebelum menggunakan variabel *control* sebesar 0,240 ($0,240 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa Komite audit sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.6 Hipotesis 6

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas kualitas audit sebelum menggunakan variabel *control* sebesar 0,201 ($0,201 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa Kualitas audit sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.7 Hipotesis 7

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas koneksi politik sesudah menggunakan variabel *control* sebesar 0,0787 ($0,0787 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa Koneksi politik sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.8 Hipotesis 8

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas kepemilikan manajerial sesudah menggunakan variabel *control* sebesar 0,451 ($0,451 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa Kepemilikan manajerial sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.9 Hipotesis 9

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas kepemilikan institusional sesudah menggunakan variabel *control* sebesar 0,621 ($0,621 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa Kepemilikan institusional sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.9 Hipotesis 10

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas komisaris independen sesudah menggunakan variabel *control* sebesar 0,515 ($0,515 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa komisaris independen sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.10 Hipotesis 11

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas komite audit sesudah menggunakan variabel *control* sebesar 0,0004 ($0,0004 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 diterima, H_1 ditolak yang berarti bahwa komite audit sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.10 Hipotesis 12

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas kualitas audit sesudah menggunakan variabel *control* sebesar 0,066 ($0,066 > 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti bahwa kualitas audit sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*.

4.6.3.7 Hipotesis 13

Berdasarkan table 4.5 dan 4.6 diatas dapat diketahui hasil sebelum dan sesudah menggunakan variabel control. Pada variabel koneksi politik sebelum menggunakan variabel control nilai probabilitas sebesar $0,022 < 0,05$ yang berarti koneksi politik sebelum menggunakan variabel control berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan sesudah menggunakan variabel control nilai probabilitasnya menjadi 0,078, yang berarti koneksi politik sesudah menggunakan variabel control tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Pada variabel kepemilikan manajerial sebelum menggunakan variabel *control* nilai probabilitas sebesar $0,865 > 0,05$ yang berarti kepemilikan manajerial sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan sesudah menggunakan variabel *control* nilai probabilitasnya sebesar $0,621 > 0,05$ yang berarti kepemilikan manajerial sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Pada variabel kepemilikan institusional sebelum menggunakan variabel *control* nilai probabilitas sebesar $0,814$ yang berarti kepemilikan institusional sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan sesudah menggunakan variabel *control* nilai probabilitasnya sebesar $0,451 > 0,05$ yang berarti kepemilikan institusional sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Pada variabel dewan komisaris independen sebelum menggunakan variabel *control* nilai probabilitas sebesar $0,248$ yang berarti dewan komisaris independen sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan sesudah menggunakan variabel *control* nilai probabilitasnya sebesar $0,515 > 0,05$ yang berarti dewan komisaris independen sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Pada variabel komite audit sebelum menggunakan variabel *control* nilai probabilitas sebesar $0,240$ yang berarti komite audit sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan sesudah menggunakan variabel *control* nilai probabilitasnya sebesar $0,0004 < 0,05$ yang berarti komite audit sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Pada variabel kualitas audit sebelum menggunakan variabel *control* nilai probabilitas sebesar $0,201$ yang berarti kualitas audit sebelum menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan sesudah menggunakan variabel *control* nilai probabilitasnya sebesar $0,066 > 0,05$

yang berarti kualitas audit sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah menggunakan variabel *control*.

4.7 Pembahasan Hasil

Penelitian ini menguji model regresi dengan variabel dependen adalah *tax aggressiveness* yang diproksikan dengan *cash effective tax ratio* dan variabel independennya adalah koneksi politik, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dengan. Variabel *control* yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan.

4.7.1 Pengaruh Koneksi Politik Sebelum Menggunakan Variabel Control Terhadap Tax Aggressiveness

Berdasarkan tabel 4.5 variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,022 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik (X_1) berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel koneksi politik yang berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_1 diterima). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono (2017), Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), dan Yopi Ferdiawan Dan Amrie Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan lobby dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong *tax evasion* atau *tax agreesiveness*. Koneksi politik yang dilakukan akan memberikan

pengaruh baik atau positif terhadap *tax aggressiveness* yang disebut dengan *Political Favoritism Effect* hal ini dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono (2017).

Selain itu juga koneksi politik dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan bantuan modal dan keuntungan dari berbagai sisi pendanaan hal ini dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) Meskipun *tax avoidance* bersifat legal menurut hukum, tetapi akan menyebabkan kerugian negara yang berimbas pada penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan BUMN diduga tidak mungkin melakukan *tax avoidance* dan dianggap wajib pajak berisiko rendah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2010 justru merupakan pihak yang mempraktikkan *tax avoidance*. Perilaku yang dilakukan oleh individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan perilaku tertentu dan sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali BUMN sekalipun dapat dijelaskan oleh *theory of reasoned action* Ni Luh Supadmi (2017). Yopi Ferdiawan Dan Amrie Firmansyah (2017) juga menyatakan bahwa perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri untuk mengurangi pajak melalui skema *profit shifting* maupun *profit holding*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatannya dengan politisi dan aparatur negara untuk memperoleh manfaat di pasar dan menghindari kemungkinan terkena hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk. Oleh karena itu, perusahaan dengan koneksi politik akan cenderung lebih terlibat pada kegiatan ekspropriasi dan memiliki tingkat manajemen yang kurang baik Menurut (Muttakin et al,2015)

4.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Sebelum Menggunakan Variabel *Control Terhadap Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.5 variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,865 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel kepemilikan manajerial yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_2 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), dan Azizah Zahirah (2017), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam mengatasi masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena mekanisme *corporate governance* atau tata kelola dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian sehingga manajerial tidak melakukan perilaku yang menyimpang I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti jumlah saham yang dimiliki manajerial tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap penghindaran pajak Azizah Zahirah (2017).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, akan dapat membuat pihak manajemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresif dalam kewajiban perpajakan di perusahaan (Atari, 2016). Karena pihak manajemen menjaga citra perusahaannya agar tetap terlihat baik, sehingga akan meningkatkan jumlah investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan.

4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Sebelum Menggunakan Variabel *Control Terhadap Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.5 variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,814 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_3 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), Nofiana Febriati (2017), Virginia (2017), Risfa Rulmadani (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi maka akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap manajer, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance* hal tersebut dinyatakan oleh Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017). Mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam mengatasi masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena mekanisme *corporate governance* atau tata kelola dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian kepada manajer sehingga manajemen tidak melakukan perilaku yang menyimpang I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018).

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena selain melakukan pengawasan terhadap manajemen, pemilik institusional memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang akan mensejahterakan para pemegang saham. Sehingga konsentrasi kepemilikan saham oleh pihak instusi belum mampu memberikan kontrol yang maksimal terhadap tindakan manajemen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan Nofiana Febriati (2017).

Kepemilikan institusional dapat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan

bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat mensejahterakan pemegang saham institusional. Karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas penghindaran pajak Virginia (2017). kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, Hal ini memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari Rulmadani (2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) bahwa Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena sifatnya independen, dan berasal dari luar institusional akan mengurangi praktik penghindaran pajak.

4.7.4 Pengaruh Komisaris Independen Sebelum Menggunakan Variabel Control Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.5 variabel komite audit memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,248 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel dewan komisaris independen yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_4 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Layli (2017), Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017), Nofiana Febriati (2017), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, dewan komisaris independen tidak memiliki kekuatan penuh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan. Peraturan yang mewajibkan adanya komisaris independen di dalam perusahaan menuntut perusahaan untuk menunjuk orang baru dari luar perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai dewan komisaris independen atau merombak jajaran dewan komisaris

yang sudah ada untuk kemudian diganti posisinya sebagai dewan komisaris independen, dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan khususnya bagi pemilik saham minoritas. Namun, pada praktiknya keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan ini masih belum mempunyai kekuatan penuh untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan dewan komisaris independen hanya sebagai sebuah bentuk formalitas belaka Nur Layli (2017).

Komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadinya karena pembentukan komisaris independen dalam perusahaan belum memerhatikan kompleksitas perusahaan sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi tindakan *tax avoidance* perusahaan Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017).

Sementara pendapat lain juga menyatakan bahwa komisaris independen tidak melakukan fungsi pengawasan beban pajak yang harus dibayarkan. Secara optimal terhadap manajemen perusahaan, sehingga manajemen masih dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk menekan praktik penghindaran pajak perusahaan oleh manajemen Nofiana Febriati (2017). Peran komisaris independen dalam mekanisme corporate governance diindikasikan tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap perilaku perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Komisaris independen, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif sehingga terhindar dari penghindaran pajak Wijayanti & Merkusiwati (2017).

4.7.5 Pengaruh Komite Audit Sebelum Menggunakan Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.5 variabel komite audit memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,240 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel komite audit yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_{11} diterima). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017), Nofiana Febriati (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), Risfa Rulmadani (2018) dan Aristianto Dwi Saputra (2018) yang menyatakan bahwa dewan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena komite audit dalam perusahaan diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan sehingga dapat menghalangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance* Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017). Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan karena Peran komite audit dalam melakukan pengawasan bertujuan agar perusahaan menyampaikan informasi keuangan secara transparan dan dapat dipercaya. Peran tersebut tidak akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan karena bagaimanapun manajemen memiliki wewenang penuh atas tindakannya Nofiana Febriati (2017).

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit memiliki peran atau tugas yang penting di dalam perusahaan. Peran komite audit adalah memeriksa dan mengawasi seluruh aktivitas pada saat proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Akan tetapi apabila komite audit berada pada periode yang lama dalam satu perusahaan tertentu akan memiliki dampak terhadap independensi komite audit itu sendiri. Semakin lama

komite audit bekerja dalam sebuah perusahaan tentu independensinya akan diragukan salah satunya independensinya terkait pelaporan pajak perusahaan Aristianto Dwi Saputra (2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulmadani (2018) Hasil penelitiannya membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Meskipun semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh keputusan mengenai kebijakan pajak dilakukan oleh pemilik perusahaan atau manajemen tingkat atas dalam perusahaan, bukan oleh komite audit.

4.7.6 Pengaruh Kualitas Audit Sebelum Menggunakan Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.6 variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,066 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit (X_5) sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel kualitas audit yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_6 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hj. Fatimah dkk. (2017), Kartika Khairunisa dkk. (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), Jaya, Arafat, & Kartika (2014), dan Winata (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya pertanyaan yang semakin sering diajukan oleh masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik setelah banyak terjadi skandal yang melibatkan oknum

akuntan publik sehingga mengakibatkan kepercayaan publik menjadi rendah, oleh karena itu untuk menjaga reputasi KAP maka akan dijamin oleh kualitas audit yang baik Hj. Fatimah dkk. (2017).

Pengaruh negatif kualitas audit terhadap tax avoidance juga dapat diterjemahkan bahwa auditor yang berkualitas tidak menghendaki manajemen perusahaan kliennya melakukan tindakan tax avoidance yang dapat mengurangi pendapatan Negara, jika nantinya ketahuan oleh aparat pajak maka auditor juga akan menerima risiko khususnya risiko reputasi karena meskipun dilakukan secara legal akan tetapi tetap saja mendapat sorotan kurang baik dari otoritas pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif Kartika Khairunisa dkk. (2017).

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan beberapa alasan, diantaranya adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan lebih ditentukan oleh moral etika pajak yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dan mereka tidak mempertimbangkan hasil audit laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan melakukan penghindaran pajak, semakin tinggi moral etika pajak, maka akan semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

4.7.7 Pengaruh Koneksi Politik Sesudah Menggunakan Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.6 variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,078 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik (X_1) sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel koneksi politik yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_7 ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melisa Fadila (2017) dan Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo (2016), yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koneksi politik, khususnya pada aspek komisaris independen, berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat koneksi politik, komisaris independen dapat tetap bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi kepada negara melalui setoran pajak yang besar. Mereka tidak berusaha memanfaatkan koneksi politik yang mereka miliki untuk mengurangi beban pajak terhadap perusahaan mereka (Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo (2016).

Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini terkait besar kecilnya koneksi politik suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak Melisa Fadila (2017). Koneksi politik suatu perusahaan justru akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tersebut guna mempertahankan citra baik di masyarakat dan investor.

4.7.8 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Sesudah Menggunakan Variabel *Control Terhadap Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.6 variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,621 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X_2) sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel kepemilikan manajerial yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_8 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), dan Azizah Zahirah (2017), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam mengatasi masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena mekanisme *corporate governance* atau tata kelola dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian sehingga manajerial tidak melakukan perilaku yang menyimpang I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018)

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, akan dapat membuat pihak manajemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresif dalam kewajiban perpajakan di perusahaan (Atari, 2016). Karena pihak manajemen menjaga citra perusahaannya agar tetap terlihat baik, sehingga akan meningkatkan jumlah investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan.

4.7.9 Pengaruh Kepemilikan Institusional Sesudah Menggunakan Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.6 variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,451 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X_3) sesudah menggunakan variabel *control* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_9 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), Nofiana Febriati (2017), Virginia (2017), Risfa Rulmadani (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi maka akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap manajer, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance* hal tersebut dinyatakan oleh Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017). Mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam mengatasi masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena mekanisme *corporate governance* atau tata kelola dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian kepada manajer

sehingga manajemen tidak melakukan perilaku yang menyimpang I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018).

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena selain melakukan pengawasan terhadap manajemen, pemilik institusional memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang akan mensejahterakan para pemegang saham. Sehingga konsentrasi kepemilikan saham oleh pihak instusi belum mampu memberikan kontrol yang maksimal terhadap tindakan manajemen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan Nofiana Febriati (2017).

Kepemilikan institusional dapat tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat mensejahterakan pemegang saham institusional. Karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas penghindaran pajak Virginia (2017). kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, Hal ini memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari Rulmadani (2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) bahwa Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena sifatnya independen, dan berasal dari luar institusional akan mengurangi praktik penghindaran pajak.

4.7.10 Pengaruh Komisaris Independen Sesudah Menggunakan Variabel Control Terhadap Tax Aggressiveness

Berdasarkan tabel 4.6 variabel komite audit memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,515 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel dewan komisaris independen yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak

sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_{10} ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Layli (2017), Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017), Nofiana Febriati (2017), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, dewan komisaris independen tidak memiliki kekuatan penuh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan. Peraturan yang mewajibkan adanya komisaris independen di dalam perusahaan menuntut perusahaan untuk menunjuk orang baru dari luar perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai dewan komisaris independen atau merombak jajaran dewan komisaris yang sudah ada untuk kemudian diganti posisinya sebagai dewan komisaris independen, dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan khususnya bagi pemilik saham minoritas. Namun, pada praktiknya keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan ini masih belum mempunyai kekuatan penuh untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan dewan komisaris independen hanya sebagai sebuah bentuk formalitas belaka Nur Layli (2017).

Sementara pendapat lain juga menyatakan bahwa komisaris independen tidak melakukan fungsi pengawasan beban pajak yang harus dibayarkan. Secara optimal terhadap manajemen perusahaan, sehingga manajemen masih dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk menekan praktik penghindaran pajak perusahaan oleh manajemen Nofiana Febriati (2017). Peran komisaris independen dalam mekanisme corporate governance diindikasikan tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap perilaku perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Komisararis independen, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif sehingga terhindar dari penghindaran pajak Wijayanti & Merkusiwati (2017).

4.7.11 Pengaruh Komite Audit Sesudah Menggunakan Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.6 variabel komite audit memiliki nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,0004 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit (X_5) sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel komite audit yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_{11} diterima). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), dan Agung Wibawa Wilopo Yusri Abdillah (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit merupakan jumlah dewan komisararis independen dalam suatu perusahaan yang menjadi faktor penting, melainkan pada tanggungjawab dewan komisararis, peneliti berandai jika dewan komisararis melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit adalah salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola kepada pihak pemilik Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017).

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisararis yang berfungsi dalam memberi pandangan terhadap masalah kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern mungkin hanya dijadikan pertimbangan dan tidak bisa mempengaruhi perilaku perusahaan. Pengambilan keputusan tetap berada di tangan manajemen itu sendiri termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Tindakan manajemen tersebut dapat dijelaskan dalam Theory of Reasoned Action (TRA). TRA menjelaskan bahwa perilaku perusahaan terhadap pengambilan keputusan perpajakannya, didasarkan atas niat dan keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan. Sehingga, keputusan yang diambil pihak manajemen tidak dipengaruhi oleh pandangan komite audit terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan Agung Wibawa Wilopo Yusri Abdillah (2016).

4.7.12 Pengaruh Kualitas Audit Sesudah Menggunakan Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Berdasarkan tabel 4.6 variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,201 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Variabel kualitas audit yang tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya (H_{12} ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hj. Fatimah dkk. (2017), Kartika Khairunisa dkk. (2017), I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018), Jaya, Arafat, & Kartika (2014), dan Winata (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh negatif kualitas audit terhadap tax avoidance juga dapat diterjemahkan bahwa auditor yang berkualitas tidak menghendaki manajemen perusahaan kliennya melakukan tindakan tax avoidance yang dapat mengurangi pendapatan Negara, jika nantinya ketahuan oleh aparat pajak maka auditor juga akan menerima risiko khususnya risiko reputasi karena meskipun dilakukan secara legal akan tetapi tetap saja mendapat sorotan kurang baik dari otoritas pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif Kartika Khairunisa dkk. (2017).

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan beberapa alasan, diantaranya adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan lebih ditentukan oleh moral etika pajak yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dan mereka tidak mempertimbangkan hasil audit laporan keuangan

perusahaan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan melakukan penghindaran pajak, semakin tinggi moral etika pajak, maka akan semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

4.7.13 Pengaruh Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Variabel *control* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dimana proksi yang dipakai adalah total asset, berdasarkan tabel 4.6 variabel *control* ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *control* ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Pada saat variabel *control* ditambahkan dalam model analisis maka terjadi perubahan pada variabel koneksi politik dan komite audit dimana nilai sig koneksi politik sebelum ditambahkan variabel *control* $< \alpha$ ($0,022 < 0,05$) yang berarti koneksi politik berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan saat ditambahkan variabel *control* nilai sig koneksi politik $> \alpha$ ($0,078 > 0,05$) yang berarti koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberpengaruhan variabel koneksi politik terhadap *tax aggressiveness* juga dipengaruhi oleh ukuran suatu perusahaan.

Variabel yang mengalami perbedaan pengaruh selanjutnya adalah komite audit, berdasarkan table 4.6 dengan variabel *control* nilai sig komite audit $< \alpha$ ($0,0004 < 0,05$) yang berarti variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, hal ini berbeda dengan nilai sig komite audit tanpa variabel *control* dimana nilai sig komite audit $> \alpha$ ($0,240 > 0,05$) yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberpengaruhan variabel komite audit terhadap *tax aggressiveness* dipengaruhi juga oleh ukuran suatu perusahaan.